

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Koperasi Syariah

a. Pengertian

Dalam Islam, koperasi tergolong sebagai *syirkah/syarikah*. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Dan, lembaga yang seperti itu sangat dipuji Islam seperti dalam firman Allah, Surat Al – Maidah Ayat 2 berikut:¹³

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya: “Dan bekerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling bekerjasama dalam dosa dan permusuhan.”(Q.S Al-Maidah[5]: 2)

Berdasarkan pada ayat Al-quran diatas kiranya dapat dipahami bahwa tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan oleh Allah. Koperasi merupakan tolong menolong, kerja sama, dan saling menutupi kebutuhan. Menutupi kebutuhan dan tolong menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna.

Menurut Marvin, A. Schars, seorang guru besar dari *University of Wisconsin, Madion USA*, yang mengatakan: *A Cooperative is a business voluntary owned and control led by its*

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm 106.

member patrons, and operated for them and by them on a non profit or cost basis. (koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau atas dasar biaya)¹⁴.

Menurut Masjfuk Zuhdi yang dikutip dalam buku Hendi Suhendi, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan. Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awunyah* (persekutuan tolong-menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, di mana yang satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian¹⁵.

Sehingga dapat disimpulkan koperasi syariah adalah jenis koperasi yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Dengan akad antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Jadi, perserikatan itu nantinya akan mewujudkan suatu akad antara dua orang atau lebih dalam hal modal dan akan mendapatkan suatu keuntungan.

¹⁴ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, Dan Praktik*, hlm 22.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Raja Grafindo Persada, 2016), hlm 289.

b. Unsur-Unsur Koperasi

Unsur-unsur dari definisi tersebut diantaranya:

- 1) Demokrasi;
- 2) Keanggotaan yang sukarela;
- 3) Bahwa tujuan utama dari koperasi adalah memberikan pelayanan kepada anggota-anggotanya, bukan untuk mencari keuntungan.

Paul Hubbert Casselman dalam bukunya mengatakan: *“cooperative is an economic system with social content”*. (koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial). Definisi ini kelihatannya sangat sederhana, tetapi sesungguhnya mencakup cakrawala yang luas. Hal ini berarti bahwa koperasi itu mengandung 2 unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial.

Sesuai dengan bunyi definisi tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi adalah tujuan ekonomi atau dengan lain perkataan bahwa koperasi harus bekerja berdasarkan motif ekonomi, sedangkan komponen- komponen atau bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur- unsur ekonomi, seperti digunakannya sistem pembukuan yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan, dan sebagainya¹⁶.

“Suatu organisasi koperasi adalah suatu perkumpulan dari sejumlah orang yang bergabung secara sukarela untuk mencapai

¹⁶ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori, Dan Praktik...* hlm 23.

suatu tujuan yang sama melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis, melalui penyetoran suatu kontribusi yang sama untuk modal yang diperlukan dan melalui pembagian risiko serta manfaat yang wajar dari usaha, di mana para anggotanya berperan secara aktif¹⁷.

c. Ciri Khusus Koperasi

Definisi di atas ditinjau dari pola strukturalnya dan diartikan menurut pengertian nominalis, maka terdapat 4 unsur yang menunjukkan ciri khusus koperasi sebagai suatu bentuk organisasi.

- 1) Adanya sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok yang memiliki sekurang kurangnya satu kepentingan.
- 2) Angan-angan individu dari kelompok koperasi antara lain bertekad mewujudkan tujuannya untuk memperbaiki situasi ekonomi dan sosial mereka melalui usaha-usaha bersama dan saling membantu (swadaya dari kelompok koperasi).
- 3) Sebagai suatu instrumen (sarana) untuk mencapai tujuan itu yaitu melalui pembentukan suatu perusahaan.

Adanya sasaran utama dari perusahaan koperasi ini yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menunjang/memperbaiki situasi ekonomi para anggota (memperbaiki situasi ekonomi perusahaan atau rumah tangga anggota)¹⁸.

¹⁷ *Ibid*, hlm 24.

¹⁸ Titik sartika partomo dan Abd. Rachman Soejoedono, "*Ekonomi Skala Kecil/Menengah Dan Koperasi*" (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 51-52.

d. Kegiatan Usaha Koperasi Syariah

Berdasarkan putusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian.
- 2) Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan ini disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.
- 3) Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq /sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan¹⁹.

¹⁹ Pasal 1, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 16/Per/M.KUKM/IX/2015

e. Peran dan Fungsi Koperasi

Fungsi dan Peran Koperasi Syariah diantaranya:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya
- 2) Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih amanah, profesional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip-prinsip syariah Islam
- 3) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi
- 4) Sebagai mediator antara penyandang dana dan pengguna dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta
- 5) Menguatkan kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerja sama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif
- 6) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja
- 7) Menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif anggota²⁰.

f. Prinsip-Prinsip Koperasi

Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut.

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

²⁰ Ahmad Ifham Sholihin, "*Buku Pintar Ekonomi Syariah*" (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm 424.

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi, mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun.

2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota.

3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi .

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan.

4) Kemandirian.

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, dan usaha sendiri²¹.

²¹ Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, "*Perkoperasian Sejarah, Teori, Dan Praktik*" (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 43.

g. Nilai Dasar Koperasi

Koperasi memiliki tiga aspek utama yaitu ekonomi, moral, dan bisnis. Jika dicermati lebih lanjut, ketiga aspek ini merupakan sumber kekuatan untuk mengikat kerjasama antar anggota dalam koperasi. Koperasi sebagai badan usaha mempunyai ciri pemilik dan pelanggannya adalah sama. Prinsip ini disebut prinsip identitas.

Kongres ICA di Stockholm pada tahun 1988 telah menyepakati empat nilai dasar utama koperasi yaitu:

1) Demokrasi (*democracy*).

Prinsip ini menekankan pada keputusan-keputusan koperasi yang diambil secara bersama yang didasarkan pada kebebasan kehendak tanpa ada pemaksaan oleh individu maupun kekuasaan dari luar koperasi.

2) Partisipasi (*participation*).

Wujud nyata prinsip ini dapat berupa pemenuhan kewajiban dalam penyerahan modal koperasi, kegiatan usaha koperasi, manajemen, simpanan-simpanan dan lain-lain.

3) Kejujuran (*honesty*).

Para penyelenggara koperasi mesti menunjukkan kejujuran dalam menyelenggarakan bisnis, manajemen umum dan personalia serta dalam aspek lainnya.

4) Kepedulian (*caring*).

Prinsip ini membarikan ciri khusus kepada koperasi sebagai organisasi yang mempunyai muatan sosial harus peduli, tanggap dan menaruh perhatian terhadap anggotanya dan masyarakat luas di sekitar wilayah kerjanya.

Keempat dasar tersebut telah menjadi dasar pedoman dalam mengarahkan jalannya organisasi koperasi sebagai badan usaha yang dimiliki oleh para anggota dan dikelola secara bersama oleh mereka dan didukung oleh para anggotanya. Keempat nilai tersebut secara implisit dapat menjadi pengikat non ekonomis dalam usaha koperasi yang pada akhirnya akan menegakkan identitas koperasi²².

2. Pemberdayaan Ekonomi

a. Pengertian Pemberdayaan

Manusia dilahirkan ke dunia untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Allah SWT menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa setiap manusia sebagai makhluk sosial seharusnya dapat bekerja sama, saling menguntungkan dan saling memanusiakan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Imran ayat 110:²³

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya Ahlulkitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka.

²² Y Harsoyo Dkk, "Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan" (Tangerang: Pustaka Widayatama, 2006), hlm 150-151.

²³ RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan, hlm 64.

Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik”(Q.S Al-Imran[3]:110)

Ayat tersebut merupakan landasan teologis bahwa pemberdayaan juga dilaksanakan dalam ajaran agama Islam. Dalam pandangan agama Islam, pemberdayaan harus dilakukan secara terus- menerus. Indonesia yang merupakan negara berpenduduk mayoritas Islam dituntut untuk melakukan upaya-upaya pemberdayaan yang sistematis untuk melahirkan masyarakat yang berkualitas²⁴.

Istilah “pemberdayaan” adalah terjemahan dari istilah asing *empowerment*. Secara leksikal, pemberdayaan berarti penguatan. Secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan. Pemberdayaan adalah upaya memperluas horison pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya²⁵.

Menurut Suharto, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah

²⁴ Nanih Machendrawaty and Agus Ahmed Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*, UIN Sunan Gunung Djati (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001).

²⁵ *Ibid*, hlm 41

perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya²⁶.

Dengan demikian pemberdayaan adalah proses memberikan kekuatan, keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya kepada individu atau kelompok agar mereka dapat mengembangkan potensi, mengambil kontrol atas kehidupan mereka, dan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan.

b. Jenis-Jenis Pemberdayaan

Pemberdayaan harus dilakukan secara terus menerus, komprehensif, dan stimulan sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan semua segmen yang diperintah. Dalam pemberdayaan ada berbagai macam bentuk program pemberdayaan, diantaranya:²⁷

- 1) Pemberdayaan Politik, yang bertujuan meningkatkan daya tawar (bargaining position) yang diperintah terhadap pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar yang diperintah mendapatkan apa yang

²⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm 60.

²⁷ Ndraha Taliziduhu, *Kronologi Ilmu Pemerintahan Baru* (Jakarta: Direksi Cipta, 2003), hlm 132.

menjadi haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian tanpa merugikan pihak lain.

- 2) Pemberdayaan sosial-budaya, bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui investasi sumber daya manusia (human investmen) guna meningkatkan nilai manusia, penggunaan, dan perakuan yang adil terhadap manusia.
- 3) Pemberdayaan lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan agar pihak yang diperintah dan lingkungan mampu beradaptasi secara kondusif dan saling menguntungkan.
- 4) Pemberdayaan ekonomi, diperuntukan sebagai upaya meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen agar berfungsi sebagai penanggung diri dampak negatif pertumbuhan, pembayaran resiko salah urus, pemikul beban pembangunan, kegagalan program, dan akibat kerusakan lingkungan.

Keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar menekankan pada hasil, tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi, yang berbasis kepada kebutuhan dan potensi masyarakat. Keterlibatan sasaran dalam tahap perencanaan merupakan satu cara untuk mengajak mereka aktif terlibat dalam proses pemberdayaan. Dengan keterlibatan tersebut, mereka memiliki ikatan emosional yang mensukseskan program pemberdayaan.

c. Pendekatan Pemberdayaan

Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu dilakukan melalui berbagai pendekatan. Menurut Suharto, penerapan pendekatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui 5P yaitu:²⁸ pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktur yang menghambat.
- 2) Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dalam memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri agar dapat menunjang kemandirian masyarakat tersebut.
- 3) Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang atau tidak sehat antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok-kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis

²⁸ Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, hlm 67.

diskriminasi dan mendominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

- 4) Penyokong, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjadi dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- 5) Pemeliharaan, memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

d. Faktor-Faktor Pemberdayaan

Menurut Hutomo terdapat beberapa faktor pendukung terjadinya pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu sebagai berikut:²⁹

1) Sumber daya manusia

Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam setiap program pemberdayaan ekonomi. Untuk itu, pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka pemberdayaan ekonomi harus mendapat penanganan

²⁹ Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik Dan Implementasi* (Jakarta: Bappenas, 2000).

yang serius. Sebab sumberdaya manusia adalah unsur paling fundamental dalam penguatan ekonomi.

2) Sumber daya alam

Sumber daya alam merupakan salah satu sumber daya pembangunan yang cukup penting dalam proses pemberdayaan ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sumber daya alam ini telah dimanfaatkan sejak jaman dahulu dari masa kehidupan nomaden sampai jaman industrialisasi.

3) Permodalan

Permodalan merupakan salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat pada umumnya. Namun, ada hal yang perlu dicermati dalam aspek permodalan yaitu, bagaimana pemberian modal tidak menimbulkan ketergantungan bagi masyarakat serta dapat mendorong usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah supaya berkembang ke arah yang maju. Cara yang cukup baik dalam memfasilitasi pemecahan masalah permodalan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, adalah dengan menjamin kredit di lembaga keuangan yang ada, dan atau memberi subsidi bunga atas pinjaman di lembaga keuangan.

4) Prasarana produksi dan pemasaran

Pendorong Produktifitas dan tumbuhnya usaha diperlukan prasarana produksi dan pemasaran. Jika hasil produksi tidak dipasarkan maka usaha akan sia-sia. Untuk itu, komponen penting lainnya dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah tersedianya prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran seperti alat transportasi dari lokasi produksi ke pasar akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan masyarakat dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, maupun pengusaha menengah.

e. Proses Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi dilakukan dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat. Untuk itu pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan untuk memberikan kesempatan kepada kelompok miskin agar merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Terdapat beberapa bentuk praktik pemberdayaan ekonomi masyarakat, antara lain yaitu sebagai berikut:³⁰

1) Pemberian bantuan modal

Salah satu aspek permasalahan yang dihadapi masyarakat tuna daya adalah permodalan. Lambannya akumulasi kapital di

³⁰ Poerwoko Soebiato Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2015).

kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi melalui aspek permodalan ini adalah dengan pemberian bantuan modal dengan tujuan tidak menimbulkan ketergantungan masyarakat. Pemecahan aspek modal ini dilakukan melalui penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan.

2) Bantuan pembangunan prasarana

Usaha mendorong produktivitas dan tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau dapat dijual hanya dengan harga yang sangat rendah. Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi,

maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis.

3) Bantuan pendampingan

Pendampingan masyarakat tunadaya memang perlu dan penting. Tugas utama pendampingan ini adalah memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan menjadi mediator untuk penguatan kemitraan baik antara usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah dengan usaha besar.

4) Penguatan kelembagaan

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Pendekatan individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan. Oleh sebab itu pendekatan yang dilakukan sebaiknya dengan pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi.

5) Penguatan kemitraan usaha

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan.

f. Tahapan Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan upaya dalam suatu proses yang dilakukan secara bertahap dan tidak dapat dilaksanakan secara instan. Adapun tahapan pemberdayaan menurut Ambar Teguh Sulistyani bahwa tahap-tahap yang dilakukan dalam proses pemberdayaan yaitu:³¹

1) Tahap Persiapan

Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan yaitu pertama, deviasi staf merupakan tenaga pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh penggerak masyarakat

³¹ Aziz Muslim, Dasar-dasar Pembangunan Masyarakat (Yogyakarta: Samudra Biru, 2012), hlm 33-34.

dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya dilakukan secara non-direktif.

2) Tahapan Penilaian

Pada tahapan ini yaitu proses penilaian dapat dilakukan secara mandiri maupun kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan "*feel needs*" dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

3) Tahap Perencanaan Alternatif Program Atau Kegiatan

Pada tahapan ini agen perubahan "exchange agent" secara partisipatif yaitu petugas ataupun pengurus mencoba mengikutsertakan masyarakat agar dapat berfikir mengenai permasalahan yang dihadapi dan bisa berfikir untuk mengatasi persoalannya. Dalam hal ini masyarakat diharapkan bisa memikirkan beberapa rencana lain dari program yang sedang atau akan dilaksanakan.

4) Tahap Pemformalisasi Rencana Aksi

Pada tahapan ini pengurus atau petugas yang sedang melaksanakan programnya akan membantu setiap kelompok untuk menentukan rencana program dan kegiatan yang akan mereka laksanakan dalam mengatasi permasalahannya.

5) Tahap Pelaksanaan “Implementasi” Program Atau Kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.

6) Tahap Evaluasi

Evaluasi merupakan proses pengawasan dari orang lain untuk mengawasi sebuah program yang sedang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat atau orang luar lainnya. Dengan keterlibatan masyarakat tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

7) Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran dalam tahap ini diharapkan program yang dilaksanakan harus segera berhenti.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari penelitian tentang subjek yang sama atau mengulang subjek yang sama, dan hindari menjiplak

karya tertentu, kemudian perlu dilakukan review terhadap penelitian yang sudah ada. Beberapa membahas penelitian-penelitian yang sejenis, penulis mengambil beberapa topic penelitian yang diambil sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nur Syamsiyah, Annisa Martina Syahrir dan Is Susanto ³²	Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Bandar	Potensi dan kekuatan koperasi syariah dalam meningkatkan pemberdayaan UKM di Bandar Lampung dapat dilihat dari data laporan pemberdayaan UKM di lokasi penelitian sebelum dan sesudah mendapatkan dukungan dari Koperasi Syariah BTM. Laporan pembiayaan UKM yang mengalami peningkatan sangat baik dari tahun ketahun, dan diprioritaskan untuk sektor layanan jasa, perdagangan dan pertanian. Sehingga dengan adanya pemberdayaan UKM yang disalurkan oleh Koperasi Syariah BTM Bandar Lampung sangat berpengaruh besar bagi nasabah, terutama terbantu dalam pengembangan usahanya.

³² Nur Syamsiyah, Annisa Martina Syahrir, and Is Susanto, "Peran Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Bandar Lampung," *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 2, no. 1 (2019): 63–73

Perbedaan Penelitian		Penelitian ini memfokuskan pemberdayaan koperasi kepada UKM yang ada di Bandar Lampung.	
Persamaan Penelitian		Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan koperasi dalam pemberdayaan	
2.	Fauzi Arif Lubis ³³	Peranan BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Kabupaten Karo (Studi Kasus Bmt Mitra Simalem Al-Karomah)	Hasil dari pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT Mitra Simalem Al Karomah dapat dilihat dari dua indikator, yaitu: (a) pertumbuhan ekonomi nasabah dan (b) tingkat partisipasinya. Berdasarkan pertumbuhan ekonomi, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh BMT Mitra Simalem Al Karomah cukup berhasil dalam meningkatkan jumlah pendapatan dibandingkan sebelum menjadi anggota pada BMT ini. Sedangkan pada aspek partisipasi, nasabah BMT Mitra Simalem Al Karomah turut memperkuat keberadaan BMT Mitra Simalem Al Karomah dengan mempercayakan pengelolaan keuangannya pada BMT ini.
Perbedaan		Penelitian ini menunjukkan bahwa tempat atau objek penelitian yang berbeda, tempat atau	

³³ Fauzi Arif Lubis, "Peranan BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Di Kecamatan Berastagi-Kabanjahe Karo (Studi Kasus BMT Mitra Simalem Al-Karomah)," *HUMAN FALAH: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2016): 271–95.

		objek yang digunakan adalah BMT Mitra Simalem Al Karomah.	
	Persamaan	Penelitian ini mengkaji peranan koperasi dalam pemberdayaan anggotanya.	
3.	Herlis Lintang Nabilila ³⁴	Koperasi Syariah dalam Pemberdayaan Anggota	Peran koperasi syariah dalam memberdayakan anggota pada KSPPS Muslimat NU Kamiliah Desa Klanderan, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri ini memang sangatlah berperan dalam pemberdayaannya karena pada koperasi ini memberikan yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan 2. Pemberian Pembiayaan 3. Berdasarkan indikator keberdayaan
	Perbedaan	Penelitian ini dilakukan upaya pemberdayaan anggota yang dilakukan oleh koperasi syariah melalui pelatihan anggota yang semuanya adalah perempuan.	
	Persamaan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran koperasi syariah dalam memberdayakan anggota.	

C. Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam bukunya *Business Research* mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana

³⁴ Herlis Lintang Nabilila, "Koperasi Syariah Dalam Pemberdayaan Anggota," *Wadiah* 4, no. 1 (2020): 61–81

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting³⁵.

Menurut Masjfuk Zuhdi yang dikutip dalam buku Hendi Suhendi, yang dimaksud dengan koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan³⁶.

Koperasi syariah menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran dalam pemberdayaan ekonomi. Koperasi syariah merupakan badan usaha koperasi yang menjalankan usaha-usahanya dengan prinsip syariah Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah³⁷.

Peran koperasi syariah dalam pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu lembaga yang dapat mensejahterakan ekonomi anggotanya. Program pemberdayaan terhadap masyarakat merupakan suatu kewajiban lembaga pemerintah dan non pemerintah. Aktivitas dimana orang-orang yang tidak berdaya menjadi berdaya atau mempunyai kehidupan yang layak, sama dengan manusia lainnya. Mensejahterakan kehidupan bangsa dalam hidup, berarti memberdayakan setiap warga negara agar mampu berbuat dan bertindak seimbang, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan serta mampu menyalurkan antara hak dan kewajiban, oleh karena itu pemberdayaan

³⁵ D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 60.

³⁶ Suhendi, *Fiqh Muamalah...* hlm 289.

³⁷ Tetsu, "Pembangunan Ekonomi Islam Dengan Pengembangan Koperasi Syari'ah", hlm

dan kesejahteraan dalam hidup merupakan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi³⁸.

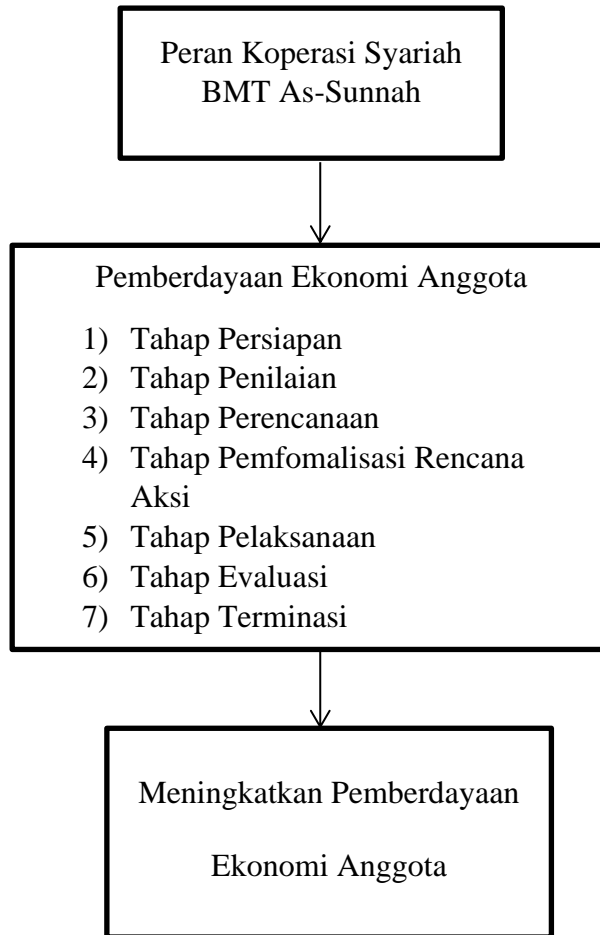
Fenomena yang terjadi di BMT As-Sunnah perekonomian yang dialami oleh anggota masih belum stabil dikarenakan faktor utama yang sering kali terjadi yaitu dari penghasilan yang rendah setiap bulannya, penghasilan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Modal yang diberikan oleh Koperasi Syariah BMT As-Sunnah yang tujuan awalnya untuk usaha, terkadang karena kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi modal tersebut digunakan untuk biaya hidup. Hal tersebut menjadikan perekonomian anggota Koperasi Syariah BMT As-Sunnah masih terbilang lemah dan belum stabil.

Fenomena yang terjadi di BMT As-Sunnah akan selesai apabila pihak BMT melakukan pemberdayaan dengan baik seperti menurut Ambar Teguh Sulistyani bahwa ada tahapan yang dilakukan dalam proses pemberdayaan sehingga bisa dikatakan pemberdayaan itu berhasil diantaranya tahap persiapan, tahap penilaian, tahap perencanaan, tahap pemfomalisasi rencana aksi, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap terminasi.

Sehingga dengan diterapkannya pemberdayaan ekonomi dengan optimal oleh pihak BMT As-Sunnah, maka dapat membantu ekonomi bagi kesejahteraan anggota.

³⁸ Kusnadi, *Pendidikan Keaksaraan: Filosofi, Strategi, Implementasi* (Jakarta: Depdiknas, 2005), hlm 219.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat penulis skemakan dalam bagan berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran